

Demokratisasi Pendidikan Demokrasi

□ **Karim Suryadi**
(IKIP Bandung)

Manusia tidak dilahirkan dengan kepercayaan, sikap, dan penghargaan tertentu tentang demokrasi. Kemelekwaan kultur demokratis (*democratic cultural literacy*) diperoleh manusia secara berkesinambungan ketika mulai berhadapan dengan stimuli politik.

Memang manusia dilahirkan dengan naluri yang kuat tentang kebebasan dan keselamatan individual, tetapi tidak dilahirkan dengan pengetahuan tentang struktur sosial dan politik yang membuat kebebasan dapat dinikmati cuma-cuma. Oleh karena itu, sebagai ajaran, demokrasi harus dipelajari, dan disebarluaskan agar tetap eksis dalam pikiran manusia. Sedangkan sebagai pilihan gaya hidup, demokrasi harus dilatihkan dan dipraktikkan sehingga ia menjadi ciri interaksi antarmanusia.

Sejalan dengan pikiran tadi, pendidikan demokrasi menjadi tak terelakan ketika tuntutan akan pentingnya menata struktur sosial dan politik secara demokratis kian menguat. Persoalannya adalah siapa yang akan terlibat dalam proses pendidikan demokrasi, serta dalam konteks budaya seperti apa praktek berdemokrasi akan disosialisasikan.

"Coalition building"

Menata iklim demokrasi tidak cukup hanya dengan mendirikan kelembagaan demokrasi. Demokrasi yang sehat, untuk sebagian besar bergantung kepada pengembangan budaya warga negara yang demokratis (*democratic civic culture*). Budaya dalam artian perilaku, praktek-praktek, dan norma-norma yang mencerminkan kemampuan rakyat untuk mengatur diri mereka sendiri (Krech, 19962: Clayton, 1992), terlebih

dalam hal menyikapi konflik melakukan kompromi, dan konsensus.

Melebihi sistem politik apapun, tuntutan sistem demokrasi terhadap kepiawaian warganya dalam mengatasi konflik, melakukan kompromi dan konsensus tidak disangsikan lagi. Hal ini bukan saja terkait dengan sifat alamiah manusia, tetapi juga menyangkut mekanisme berdemokrasi.

Secara alami manusia memiliki beragam keinginan yang kadang-kadang kontradiktif. Manusia mengidam-idamkan rasa aman hadir di tengah-tengah hidupnya, tetapi pada saat yang sama, ia menyukai petualangan. Suatu waktu manusia membela kebebasan individual sambil mengumandangkan pentingnya persamaan sosial.

Sama seperti kehidupan manusia, perjalanan demokrasi kadang diwarnai cerita yang penuh paradoks. Larry Diamond (1991, dalam Fin, 1991), seorang peneliti pada Hoover Institution, menuturkan paradoks utama demokrasi hadir dalam bentuk konflik dan konsensus. Menurutnya, demokrasi dalam banyak hal tidak sekedar seperangkat aturan untuk menata konflik. Konflik harus ditata dalam batas-batas tertentu sehingga menghasilkan kompromi, konsensus, atau kesepakatan lain di mana semua sisi di terima secara *legitimate*.

Larry Diamond tampaknya memandang demokrasi sebagai sebuah persamaan yang dibangun dari unsur-unsur konflik, kompromi atau kesepakatan. Semua unsur harus mendapat perhatian yang proporsional ketika persamaan akan diterjemahkan maknanya.

Penekanan yang berlebihan pada satu unsur persamaan dapat mengancam keseluruhan pengertian yang dibangun persamaan. Jika

sebagian masyarakat menganggap demokrasi sebagai tidak lebih dari sekedar sebuah forum dimana mereka dapat mendesakkan tuntutan, tatanan masyarakat demokratis dapat hancur dari dalam. Sebaliknya jika negara menggunakan tekanan untuk mencapai konsensus atau cara lain dalam membungkam suara-suara rakyat, maka hal ini merupakan penghancuran masyarakat dari atas.

Sebuah masyarakat demokratis menuntut komitmen warganya dalam menyikapi konflik yang tak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan *toleransi* (Waldoo, 1962), sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.

Akar konflik pada masyarakat demokratis terletak pada persoalan interpretasi yang beragam tentang hak-hak demokratis dan prioritas sosial. Sekedar contoh, kerap menjadi perdebatan yang mengarah pada konflik tentang seberapa jauh hak negara untuk mengganti rugi tanah milik warga karena negara akan mengubahnya menjadi jalan tol. Tidakkah hak-hak sekelompok warga tertanggung, atau dengan bahasa lain, apakah masyarakat merasa terlindungi bila aparat membubarkan aksi demonstrasi di jalanan?

Dua contoh tadi terasa tidak sederhana, dan literatur demokrasi tidak menyediakan jawaban yang rinci atas masalah serupa. Buku-buku teks demokrasi hanya menyediakan arahan dalam bentuk garis besar dalam menyikapi dan menganalisis isu-isu tersebut.

Apa yang pernah disebut Diane Revitch (1991) sebagai *coalition building* layak untuk disimak. Menurutnya, bangunan koalisi adalah esensi tindakan demokratis. Ia mendidik *interest group* untuk melakukan negosiasi dengan yang lainnya, berkompromi dan bekerja dalam sistem konstitusional. Dengan melakukan pemeliharaan koalisi, kelompok dengan perbedaannya belajar bagaimana bangunan dengan cara-cara damai, bagaimana mengejar tujuan mereka dengan cara-cara demokratik dan akhirnya bagaimana hidup rukun dalam dunia yang majemuk.

Apa yang ditawarkan Revitch sebenarnya adalah cara pandang tentang demokrasi yang dipahami bukan hanya seperangkat doktrin tentang kebenaran yang tidak berubah. Tetapi sebagai sebuah mekanisme penyelesaian perselisihan dan kompromi ide-ide dan kepentingan individu atau lembaga betapapun tidak sempurnanya yang memungkinkan ditemukannya kebenaran atau penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

Suka atau tidak inilah sisi pragmatis demokrasi. Ide dan pemecahan masalah tidak diuji melalui ideologi yang kaku, melainkan dicobakan dalam kehidupan sosial, sehingga ide dan pemecahan tadi argumentatif dan terus mengikuti perkembangan alam pikiran manusia, diterima atau mungkin pula dibuang.

Jadi, di dalam masyarakat demokratis, betapapun sempitnya, selalu tersedia ruang untuk berdialog dan melakukan pengujian atas cara-cara penyelesaian masalah yang telah menjadi pola yang berulang. Semua kesalahan diidentifikasi sehingga kesalahan yang sama tidak terjadi dua kali. Kemungkinan kelompok mempertemukan dan memecahkan perbedaan dan menawarkan peluang untuk melakukan inovasi dan investasi untuk ketersediaan infrastruktur yang tidak langsung bersinggungan dengan dunia politik pun tetap terjamin, sehingga kehidupan betul-betul terpadu dalam segala aspeknya.

Pendidikan dan Demokrasi

Bagi masyarakat demokratis, pendidikan merupakan komponen vital. Dikatakan demikian karena atribut-atribut warga negara yang demokratis dibina melalui pendidikan. Berbeda dengan masyarakat otoriter yang menuntut penerimaan warga secara pasif (*passive acceptance*), tujuan pendidikan demokrasi adalah menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dengan pandangan dan praktek-praktek demokrasi.

Dikaji dari sudut ini, belum cukup demokratis bila tujuan pendidikan baru dihindarkan dari indoktrinasi ideologi yang dianut razim penguasa. Masih jauh pula dari demokratis bila, atas nama semangat demokratisasi pendidikan, memaksakan "sterilisasi" muatan pengajaran dari tendensi dan nilai-nilai politik.

Bagaimanapun keterlibatan nilai, termasuk nilai-nilai politik, dalam pendidikan sudah menjadi keniscayaan. Sebab semua praktek pendidikan pada hakikatnya adalah proses penerusan nilai-nilai, disengaja atau tidak. Sehingga tidak melanggar prinsip demokrasi jika saja murid dilatih untuk memikirkan prinsip-prinsip demokrasi dalam semangat *inquiry* terbuka. Jika hal ini terjadi, bukan saja murid akan memahami sejumlah prinsip demokrasi, tetapi juga mereka dapat menjalani berbagai latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam *setting* diskusi.

Murid ditantang menguji validitas pikiran konvensional dengan argumen-argumen yang rasional dan penyelidikan yang seksama. Mungkin juga debat hangat tentang kejadian-kejadian atau fakta yang tidak menyenangkan dan kontroversial.

Hal ini berimplikasi lebih jauh kepada penataan kebijakan pendidikan secara makro. Sebagai produk politik, kebijakan pendidikan amat sulit dilepaskan dari kepentingan politik yang telah digariskan penguasa. Di sinilah justru komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi diuji. Jika sistem pendidikan yang dirancang di negara otiriter ditempatkan sebagai alat rezim yang berkuasa, maka sistem pendidikan yang dikembangkan dalam masyarakat demokratis adalah sistem yang memungkinkan rakyatnya dapat mencipta, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas rezim, karena dalam masyarakat demokratis rezim adalah pelayan rakyat (Hook, 1962)

Pada saat yang sama, mereka yang memainkan peran sebagai pemimpin opini

(*opinion leaders*) masyarakat, apakah itu pejabat pemerintah, ketua parpol, kiai, tokoh demonstran atau lainnya, dituntut lebih mengedepankan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Apakah ini tak kalah penting karena ketika masyarakat akan berucap mereka mengacu kepada terima yang digunakan pemimpin opininya. Demikian pula ketika mereka harus memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mereka pun merujuk pada pola perilaku yang ditampilkan pemimpin opininya.

Dalam kaitan ini, peranan media massa dalam menghadirkan pemimpin opini yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip demokrasi sangat penting. Lebih-lebih dalam masyarakat yang mulai menganut pola komunikasi bermedia, kemunculan seorang pemimpin opini dalam media massa diyakini akan memiliki bobot pengaruh yang kuat bagi khalayaknya.

Dikaji dari perspektif seperti ini, media massa berperan sebagai sumber belajar tentang demokrasi. Tentang masalah ini telah cukup lama menjadi perhatian ahli komunikasi. Fleur dan Rokeah (1989); Bandura (1977) misalnya, memformulasi masalah ini dalam *modeling theory*. Menurut teori ini, pemimpin opini; yang tampil di media massa segera menjadi model bagi khalayak. Mereka menjadi tempat khalayak mengindenfikasikan perilaku, hingga tiba pada keputusan untuk meniru perilaku model ketika khalayak berhadapan dengan situasi atau stimulus yang relevan dengan perilaku model sebagai respons khalayak terhadap situasi tadi.

Apa yang diharapkan dari pendidikan demokrasi sekurang-kurangnya membina individu dan kelompok agar memiliki keinginan dan mendasarkan tindakannya pada semangat menemukan kompromi dalam mencari penyelesaian masalah secara spesifik yang berlandaskan pada prinsip umum regulasi mayoritas dan penjaminan hak-hak minoritas, baik dalam lingkungan terdekat hingga *setting* negara bangsa.

Demokrasi bukanlah sebuah kristal yang dengan teknologi maju dapat diciptakan secara instan. Demokrasi adalah proses yang harus diusahakan penegakkannya. Proses yang telah dirintis para pendiri negara sejak embrio zaman pergerakan hingga perdebatan demokrasi pada hari kemarin sekali-kali tidak menyiratkan bahwa diskusi, sosialisasi, dan perjuangan menegakkan demokrasi akan mengenal akhir.

Daftar pustaka

- Krech, David, Richard S. Crutthfield and Egerton L. Ballachy, 1962, *Individual in Society*, Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha Ltd.
- Clayton, Constance, 1992, "We Can Educate All Our Children" in Ryan and Cooper (1992), *Kaleidoscope: Reading in Education Py*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Fin Jr. Chester E. 1991, "Teaching Democracy: Why and How It Must Be Taught in a Democratic Society", Remark prepared for the Nicaraguan Civic Education Conference, Managua, Nicaragua, June, 1991.
- Diane, Revitch, 1991, "Education and Culture in a Free Society", Address to the Educational Excellence Network International Civic Educational Conference, Washington, D.C., April, 1991.
- Association of Teacher Education, 1990 "Restructuring the Education of Teachers", Report of the Commission on the Education of Teachers into the 21st Century.
- Hook, Sidney, (1962), "Communism and Democracy" in Curtis, 1962, *The Nature of Politics*, USA: Avon Book Division, The Hearst Corporation.
- Fleur, Melvin and Sandra Ball Rokeach, 1989, *Theories of Mass Communication*, Fifth Edition, London: Longman.
- Bandura, Albert, 1993, *Social Learning Theory*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Beach, Waldo (1962), "What Is Tolerance in a Democratic Society?", in Curtis, Michael, 1962, *The Nature of Politics*, USA: Avon Book Division: The Hearst Corporation.
- Deutsch, Karl W., 1963, *The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control*, London: Collier Macmillan, Ltd.